

**Optimalisasi Dana Peningkatan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran dan
Bencana Dalam Perspektif *Disaster Risk Management***

¹Muhammad Febriansyah Rohimat, Abdal, Rahayu Kusumadewi

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; muhfebri4@gmail.com

Received: February 28, 2022; In Revised: June 21, 2022; Accepted: July 4, 2022

Abstract

The establishment of disaster preparedness in the community is a very important thing to be done by the government. This is because Indonesia is located in the ring of fire belt areas which causes a variety of potential disasters. In dealing with this, Bandung city government through the Bandung City Fire and Disaster Management Office established a program in order to improve preparedness. Therefore, the government needs to optimize the available budget in order to achieve this goal. The research objective to be achieved in this paper is to analyze how the optimization of funds for the Fire and Disaster Preparedness and Prevention Program from the perspective of disaster risk management in the Bandung City Fire and Disaster Management Office. This research is a descriptive research utilizing qualitative method. Data collection was conducted using structured interviews, literature reviews, and unstructured observations in research locations. The result of this research is the formation of disaster preparedness in the community has not been fully optimized. This is due to the non-fulfillment of existing parameters in disaster risk management such as knowledge about disasters, emergency planning, and warning systems.

Keywords: Disaster Preparedness, Disaster Risk Management, Fund Optimization

Pendahuluan

Bencana merupakan peristiwa yang terjadi secara alamiah ataupun nonalamiah yang dapat mengakibatkan beragam dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, timbulnya korban jiwa, dampak psikologis, kerugian harta dan benda, dan lainnya (Amri et al., 2016). Fenomena bencana telah menjadi tantangan bersama pada negara-negara di dunia. Salah satu penyebab hal tersebut ialah tidak dapat diprediksinya kapan akan terjadinya bencana alam seperti gempa, banjir, tsunami, longsor, dan bahkan bencana yang disebabkan oleh ulah manusia sendiri seperti kebakaran di area penduduk. Upaya mitigasi menjadi langkah wajib yang perlu diperhatikan oleh tiap negara melalui kebijakan publik yang diterapkan dengan orientasi pembentukan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan bencana. Pernyataan tersebut didukung oleh kajian yang dilakukan oleh (Artiningsih et al., 2016) bahwa jika ditinjau pada aspek historis, seluruh wilayah di dunia ini telah dilanda bencana. Maka dari itu pembentukan kesadaran masyarakat memiliki urgensi tinggi untuk memberikan reduksi terhadap dampak yang dihasilkan dari bencana yang terjadi.

Diantara negara yang memiliki potensi bencana yang tergolong tinggi adalah Indonesia. Secara geografis Indonesia berada pada posisi *ring of fire belt* yang merupakan lempeng tektonik dengan predikat paling aktif di dunia. Dampak atau kontribusi yang dihasilkan daripada lempeng tektonik tersebut ialah menjadi penyebab 90% gempa di bumi. Hal ini didasarkan atas publikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Amri et al., 2016) bahwa negara-negara yang terletak pada posisi atau rangkaian *ring of fire belt* memberikan dampak gempa luar biasa dengan persentase 90%. Bahkan ditemukan bahwa gempa yang terjadi tergolong gempa dengan dampak yang besar. Pada tahun 2020 tercatat telah terjadi 8.264 gempa di Indonesia (Pusparisa, 2021). Tidak hanya pada bencana gempa, letusan gunung api

menjadi bencana lainnya yang menghantui Indonesia. Dengan 127 gunung berapi aktif yang merupakan 12% daripada total pegunungan di dunia menjadi ancaman bahaya bagi masyarakat Indonesia. Sejak tahun 2011-2019 ditemukan bahwa telah terjadi 102 bencana letusan gunung api (Pusparisa, 2020). Lebih lanjut, kebakaran sebagai salah satu bencana yang sering melanda Indonesia telah melahap 526.920 hektare lahan di Indonesia dari tahun 2019-2020 (sipongi.menlhk.go.id, 2021). Hal ini sejalan dengan pernyataan Engkus et al. (2020) bahwa Indonesia dewasa ini mengalami permasalahan bencana yang kompleks mulai dari banjir, kebakaran, dan longsor yang mengancam kestabilan beragam aspek.

Melihat tingginya potensi terjadinya bencana alamiah ataupun nonalamiah terutama pengalaman dari bencana yang telah terjadi seperti tsunami Aceh pada tahun 2004, Pemerintah Indonesia memandang serius akan pentingnya membentuk kesiapsiagaan. Keseriusan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Di dalamnya mengatur mekanisme mengenai penanggulangan bencana baik pada tingkat pusat maupun daerah dengan fokus pada tiga tahap, yaitu prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Pada tahap prabencana, yakni keadaan di mana tidak terjadi bencana namun tetap terdapat potensi terjadinya bencana, maka perlu dilakukannya pembentukan mitigasi bencana, sosialisasi secara masif, peringatan dini, dan kesiapsiagaan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 44 UU No.24 Tahun 2007. Terlebih dalam penelitian Muis et al (2019) memaparkan bahwa penanganan bencana merupakan kewajiban pemerintah untuk menekan dampak yang diakibatkannya.

Selanjutnya, jika dikerucutkan pada salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi tinggi terjadinya bencana, seperti Provinsi Jawa Barat turut mendukung dan melaksanakan pembentukan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Provinsi Jawa Barat termasuk provinsi yang memiliki potensi tinggi terjadinya bencana alam yang dapat ditinjau dalam dua aspek. *Pertama*, aspek geografis Provinsi Jawa Barat yang terletak pada daerah rawan gempa. *Kedua*, aspek demografis dengan jumlah penduduk mencapai 49 juta yang membawa Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak dibandingkan 33 provinsi lainnya (BPS, 2021). Hal ini diperkuat oleh pernyataan Marlyono et al (2016) bahwa tingkat kerawanan Provinsi Jawa Barat terhadap bencana sangatlah tinggi dan telah mengakibatkan banyaknya korban seperti yang terjadi pada tahun 2006, tsunami di Kabupaten Pangandaran yang telah menelan korban jiwa sebesar 500 orang. Maka dari itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur No.68 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Diantara bentuk realisasi daripada peraturan tersebut ialah dilaksanakannya mitigasi nonstruktural yang dilakukan oleh instansi pemerintahan terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat (BPBD) melalui diseminasi terhadap masyarakat dan mitigasi structural dengan menjaga lingkungan hidup (jabarprov.go.id, 2018).

Pembentukan kesiapsiagaan dilakukan secara menyeluruh pada tiap kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Salah satunya ialah di Kota Bandung melalui Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Melalui Peraturan Wali Kota No 1400 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung mengatur secara formal mengenai upaya yang perlu diimplementasikan mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan administrasi yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa terdapat pembagian tugas, pokok, dan fungsi yang dimiliki dalam empat bidang, yaitu a) Bidang Pencegahan Kebakaran, b) Bidang kesiapsiagaan, operasi pemadaman, dan penyelamatan, c) Bidang Penanggulangan Bencana, dan d) Bidang Sarana dan Prasarana. Adapun risiko bencana di Kota Bandung terbilang tinggi. Hal ini dapat dilihat pada matriks kajian risiko bencana Kota

Bandung sebagai berikut:

Tabel 1.

Matriks Kajian Risiko Bencana Kota Bandung Kelas Interval Sedang

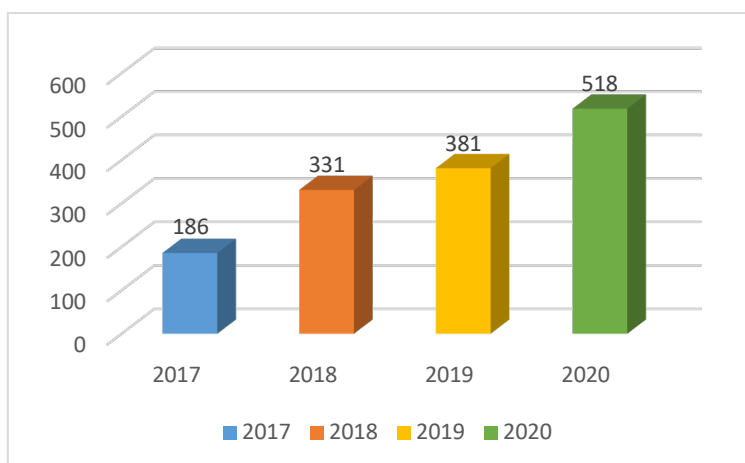
Bencana	Risiko Sosial (Jiwa)	Risiko Fisik (Juta)
Longsor	571	53.818
Banjir	1.129.752	-
Gempabumi	1.424.320	3.888.007
Banjir Bandung	66.297	177.664

Sumber: Amri et al (2016)

Melihat tingginya risiko bencana di Kota Bandung seperti pada tabel tersebut mendasari fokus peneliti terhadap pembentukan kesiapsiagaan pada masyarakat Kota Bandung. Ditambah, Kejadian bencana di Kota Bandung tiap tahunnya mengalami peningkatan dari segi kuantitas yang terjadi. Bencana tersebut diantaranya terdiri dari banjir, longsor, kecelakaan, pohon tumbang, pencarian orang, penyelamatan binatang, dan lainnya. Berikut ini grafik perkembangan kasus bencana nonkebakaran di Kota Bandung sejak tahun 2017-2020:

Grafik 1.

Perkembangan Jumlah Terjadinya Bencana Nonkebakaran di Kota Bandung Tahun 2017-2020



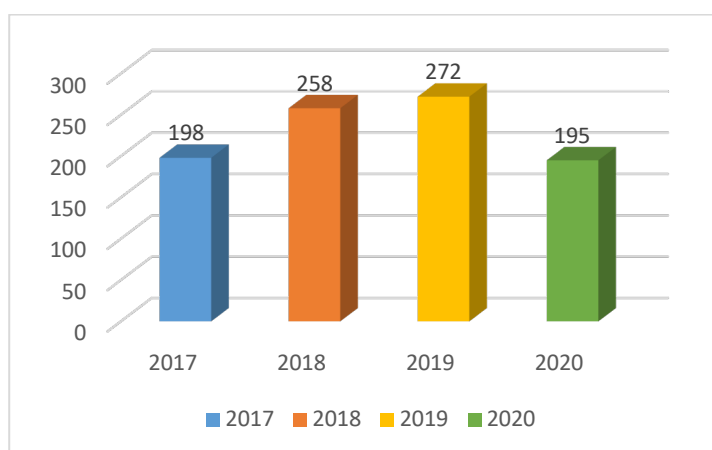
Sumber: DKPB, BPS (Diolah Peneliti, 2021)

Pada grafik tersebut menunjukkan terjadinya kenaikan intensitas bencana dari tahun 2017-2020 dengan total 1.416 bencana. Kenaikan jumlah terjadinya bencana dapat dilihat pada tahun 2018 terjadi kenaikan secara signifikan sebesar 145 bencana dari tahun 2017 sehingga total terjadinya bencana, yaitu 331. Lalu, pada tahun 2019 terjadi kenaikan 50 kejadian bencana, jika ditotalkan terjadi 381 bencana. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi kenaikan yang signifikan, yakni 137 bencana, maka total bencana yang terjadi pada tahun 2020, yaitu 518 bencana. Kenaikan tersebut menjadi indikasi akan pentingnya membangun kesadaran masyarakat akan bencana. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Khambali (2017) memaparkan bahwa fokus utama yang perlu dibangun ialah membentuk kesiapan masyarakat agar melakukan tindakan tepat dalam menghadapi bencana, mengurangi risiko yang akan dihadapi, dan melakukan tindakan administrasi atau pengelolaan untuk membangun kesadaran kolektif pada kehidupan masyarakat agar lebih tangguh dan tangkas ketika menghadapi situasi bencana.

Selanjutnya, terdapat bencana yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, yakni kebakaran.

Merujuk pada definisi bencana yang dikemukakan oleh Parker dalam (Khambali, 2017) bahwa bencana merupakan peristiwa yang disebabkan oleh faktor alamiah ataupun manusia yang tidak biasanya terjadi, termasuk pula di dalamnya dampak daripada penggunaan teknologi, pola hidup masyarakat, dan perubahan lingkungan. Maka kejadian kebakaran dapat digolongkan menjadi kejadian bencana. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Putri (2020) dalam tulisannya bahwa kebakaran pada pemukiman, pabrik, pasar, dan lainnya termasuk jenis bencana nonalam atau yang disebabkan oleh faktor manusia dan di luar faktor alamiah. Adapun grafik daripada kebakaran yang terjadi di Kota Bandung sejak tahun 2017-2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.
Perkembangan Jumlah Terjadinya Kebakaran di Kota Bandung



Sumber: DKPB, BPS (Diolah Peneliti, 2021)

Grafik tersebut menunjukkan perkembangan jumlah kebakaran yang terjadi di Kota Bandung dimulai dari tahun 2017-2020. Pada tahun 2017 terhitung 198 kebakaran yang terjadi, selanjutnya tahun 2018 terjadi 258 kejadian kebakaran, lalu tahun 2019 kebakaran terjadi dengan total 272, dan pada tahun 2020 telah terjadi 195 kejadian kebakaran. Fluktuasi terjadi tiap tahunnya sebagai contoh pada tahun 2018 terjadi kenaikan 60 kejadian kebakaran. Kenaikan pun terjadi pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2019 dengan total kenaikan 14 kejadian kebakaran. Sementara pada tahun 2020 terjadi penurunan cukup signifikan, yakni penurunan 77 kejadian kebakaran.

Melihat masih tingginya kejadian bencana yang terjadi di Kota Bandung, maka perlu dilakukan optimalisasi agar tercapainya kinerja dan *outcome* yang prima. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintahan, yaitu melalui anggaran. Peran anggaran terhadap kinerja sangatlah signifikan karena mekanisme kinerja instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dipengaruhi kuat oleh sistem informasi pengelolaan keuangan, anggaran, dan sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan (Kertiani et al., 2020). Dikaitkan dengan upaya pembentukan kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana seperti kebakaran, gempa, dan bencana lainnya, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana melakukan penganggaran untuk mendukung upaya tersebut. Berikut ini merupakan jumlah Dana Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegah Bahaya Kebakaran dan Bencana tahun 2019-2020:

Tabel 2.
Jumlah Dana Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegah Bahaya Kebakaran dan Bencana

Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
2019	1.218.697.608	1.191.738.100	26.959.508	97,79%
2020	378.226.100	365.072.540	13.153.560	96,52

Sumber: LKPJ Kota Bandung, DKPB (Diolah Peneliti, 2021)

Tabel tersebut merupakan jumlah Dana Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegah Bahaya Kebakaran dan Bencana yang diperoleh oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana pada tahun 2019-2020. Realisasi anggaran yang dilakukan belum mencapai persentase 100%. Sehingga terdapatnya silpa pada tiap tahun anggaran. Bahkan, terjadi penurunan jumlah anggaran yang diperoleh pada tahun 2020 menjadi 378 juta. Hal ini disebabkan oleh dilakukannya *refocussing* anggaran sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Ditambah, peneliti menemukan bahwa dana awal Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana ialah 1.302.379.700 berdasarkan Rencana Kerja Permerintah Daerah (RKPD) tahun 2020.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rozai & Subagiyo (2015) menyatakan bahwa tidak tercapainya target realisasi anggaran berimplikasi pada terjadinya *idle money*. Istilah tersebut merupakan kondisi dimana dana yang telah dialokasikan tidak termanfaatkan dengan semestinya maka akan berimplikasi pada target kinerja yang hendak dicapai. Penurunan capaian kinerja pun dapat dilihat pada salah satu turunan daripada program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegah Bahaya Kebakaran dan Bencana, yakni Kelurahan Siaga Aktif dan Bencana. Pada tahun 2020 capaian target program tersebut ialah 97,37%. Sedangkan pada tahun 2019 telah mencapai 100%.

Berangkat dari belum terealisasi anggaran secara sepenuhnya, maka Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana perlu melakukan optimalisasi dan meningkatkan realisasi anggaran dalam upaya membentuk kesiapsiagaan prabencana pada masyarakat Kota Bandung melalui perspektif *disaster risk management*. Adapun penelitian ini dilakukan sebagai bahan evaluasi dan kontribusi praktis dalam upaya peningkatan kinerja pemerintah untuk membentuk kesiapsiagaan masyarakat terhadap kebakaran dan bencana. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah “Bagaimana optimalisasi dana Program Kesiapsiagaan dan Pencegah Bahaya Kebakaran dan Bencana dalam perspektif *disaster risk management* di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung?”.

Penelitian mengenai kesiapsiagaan dalam kebakaran pernah dilakukan oleh Saut Sagala, Ramanditya Wimbardana, dan Ferdinand Patrick Pratama. Penelitian ini mengangkat mengenai kesiapsiagaan masyarakat setempat di permukiman dengan jumlah penduduk yang terbilang banyak terhadap risiko dan potensi kebakaran pada Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung yang merupakan daerah perkotaan. Judul pada penelitian ini adalah “Perilaku dan Kesiapsiagaan Terkait Kebakaran Pada Penghuni Permukiman Padat Kota Bandung”. Metode penelitian yang digunakan melalui *disproportional cluster sampling* melalui metode kuesioner yang disebarkan pada 250 sampel. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini, yaitu kesadaran masyarakat akan penanganan kebakaran telah dipahami cukup baik. Namun, ditemukan bahwa banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi mengenai kesiapsiagaan dan mitigasi kebakaran (Sagala et al., 2013).

Selain daripada itu, penelitian mengenai optimalisasi telah dilakukan oleh Muhrom Ali

Rozai dan Lilik Subagiyo yang membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran dan pengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Judul penelitian ini adalah “Optimalisasi Penyerapan Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Organisasi (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Boyolali)”. Metode penelitian pada artikel ini adalah analisis eksplorasi dengan bahan utama Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintahan (LAKIP). Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah serapan anggaran di organisasi tersebut sudah maksimal dan terjadi peningkatan akan prestasi kinerja organisasi (Rozai & Subagiyo, 2015).

Adapun novelty atau kebaruan pada penelitian ini dibanding peneliti terdahulu adalah penulis menggunakan perspektif disaster risk management sebagai basis pelaksanaan penelitian. Lebih daripada itu, peneliti melakukan analisis terkait optimalisasi dana Program Kesiapsiagaan dan Pencegah Bahaya Kebakaran dan Bencana. Sehingga penelitian ini akan menghasilkan analisis mendalam mengenai kesiapsiagaan terhadap kebakaran dan bencana melalui perspektif disaster risk management.

Sebagai basis dalam melakukan penelitian mengenai optimalisasi dana dalam pembentukan kesiapsiagaan yang diterapkan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, peneliti menggunakan parameter yang dikemukakan oleh Adiyoso (2018) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Bencana Pengantar & Isu-Isu Strategis”. Dalam buku tersebut dikemukakan bahwa disaster risk management diklasifikasikan kedalam tiga tahapan, yakni prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Peneliti memfokuskan pada tahapan prabencana yakni kesiapsiagaan yang merupakan strategi penanggulangan bencana pada saat terdapatnya potensi bencana. Lebih lanjut, parameter yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

1. Pengetahuan tentang bencana

Dalam *disaster risk management*, tindakan pengelolaan terhadap bencana dipengaruhi dan ditentukan oleh pengetahuan masyarakat. Maka dari itu pengetahuan mengenai jenis ancaman yang akan terjadi pada suatu teritori seperti longsor, kebakaran, banjir, dan lainnya menjadi suatu keharusan untuk diketahui. Tidak hanya itu, karakteristik seperti kekuatan ancaman, penyebab terjadinya bencana, durasi, dan area yang berpotensi terkena ancaman bencana tersebut perlu diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

2. Kebijakan

Langkah konkret dalam membentuk kesiapsiagaan di masyarakat ialah melalui kebijakan. Manifestasi kebijakan dapat disalurkan dalam pembentukan rencana kurikulum pendidikan, perencanaan sumber daya manusia yang turut terlibat, fasilitas, dan pendanaan untuk penyelenggaraan kesiapsiagaan.

3. Perencanaan kedaruratan

Pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana perlu dibuktikan dengan ketersediaan alat-alat dan pemahaman warga akan penerapannya. Oleh karena itu, perlunya mekanisme yang disusun secara kolektif untuk menentukan standar pasti. Standar beserta mekanisme tersebut termasuk pada perencanaan kesiapsiagaan bencana seperti penentuan lokasi penampungan sementara, perencanaan rute-rute evakuasi, penentuan sumber daya darurat seperti makanan, obat-obatan, dan alur distribusi dalam penyalurannya, serta pembentukan pola komunikasi yang efektif antartiap pihak.

4. Sistem Peringatan

Pembangunan informasi dan peringatan dini terhadap potensi kebakaran dan bencana merupakan salah satu poin penting dalam perencanaan kesiapsiagaan. Sistem peringatan tersebut perlu dibentuk secara spesifik menyesuaikan dengan bencana atau ancaman yang akan dihadapi. Hal ini dikarenakan dengan adanya sistem peringatan yang tepat, maka dampak negatif dari adanya ancaman tersebut dapat ditekan, bahkan dihindari.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hal ini ditujukan untuk memberi gambaran mengenai optimalisasi anggaran Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegah Bahaya Kebakaran dan Bencana dalam perspektif *disaster risk management* sebagai upaya pembentukan kesiapsiagaan yang dilengkapi dengan perspektif informan dan tinjauan literatur dalam penelitian ini. Selain itu, tujuan tersebut selaras dengan maksud dari penelitian kualitatif dalam (Moleong, 2021) bahwa intisari daripada penelitian kualitatif untuk menelaah dan memberi gambaran atau fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara terstruktur karena sumber data utama dalam penelitian kualitatif merupakan kata-kata, lalu ditambah dengan studi kepustakaan, dan dilengkapi dengan observasi tidak terstruktur di sekitar lokus penelitian, yaitu Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung selama enam bulan dimulai dari Desember tahun 2021 hingga Mei tahun 2022.

Dalam rangka memperdalam fokus penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Singkatnya penentuan teknik tersebut dilatarbelakangi oleh perspektif peneliti bahwa informan tersebut yang paling mengetahui mengenai fokus penelitian yang dilakukan. Dengan tujuan untuk mendapatkan dan memerinci informasi khusus mengenai optimalisasi dana Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegah Bahaya Kebaran dan bencana dari pelbagai macam sumber. Lalu, bahan dan alat utama dalam penelitian ini, yaitu protokol wawancara. Lalu informan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.
Informan Penelitian

No	Inisial	Jabatan	Keterangan
1.	RD	Seksi Darurat Logistik	1
2.	AP	Seksi Pencegahan & Mitigasi Bencana	1
3.	S	Sekretaris Kelurahan Cisaranten Kulon	1
4.	TA	Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana KNPI	
5.	M	Ketua RW 06 Cisaranten Kulon	1
Total			5

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Proses analisis data dilakukan melalui model Miles & Huberman yang didasarkan pada pandangan paradigma positivism (Moleong, 2021). Di mana terdiri dari tiga hal pokok, yakni *data reduction*, *display data*, dan *conclusion drawing* yang dilengkapi dengan kerangka konseptual *disaster risk management* yang dikemukakan oleh Wignyو Adiyoso dalam

bukunya yang berjudul “*Manajemen Bencana Pengantar & Isu-Isu Strategis*”. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti melakukan teknik triangulasi data dengan melakukan pengecekan pada berbagai sumber data sebagai upaya pengecekan atau pembandingan dari data yang telah diperoleh seperti pada dokumen resmi, buku, jurnal, dan pemberitaan media massa (Moleong, 2021).

Hasil dan Pembahasan

1. Pengetahuan tentang bencana

Pengetahuan masyarakat mengenai potensi dan ancaman bencana di Kota Bandung terbilang rendah. Baik itu ancaman bencana bersifat alam, nonalam, dan sosial. Hal ini didasarkan atas pernyataan daripada Pembina Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa kepedulian dan keterampilan masyarakat dalam melakukan pembentukan kesiapsiagaan relatif rendah (Ridwan, 2019). Selain itu, peneliti melakukan validasi terhadap aparatur pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dengan melakukan wawancara terhadap Seksi Darurat Logistik dan Seksi Pencegahan dan Mitigasi Bencana. Lalu, ditemukan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kebencanaan Kota Bandung berada pada tingkatan menengah ke rendah. Lebih lanjut, berdasarkan penuturan daripada Sekretaris Kelurahan Cisaranten Kulon dan Ketua RW 06 Cisaranten Kulon mengemukakan bahwa pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemahaman mengenai potensi bencana dan pembentukan kesiapsiagaan cukup rendah.

Padahal kesuksesan pembentukan kesiapsiagaan tergantung pada pengetahuan yang diperoleh pada setiap elemen masyarakat mengenai potensi bencana di suatu wilayah. Kota Bandung dalam hal ini memiliki terberagam potensi bencana seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, kebakaran, dan lainnya (Alryanto, 2017). Bahkan, hal ini telah dipublikasikan pada kajian yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan melakukan pemetaan matriks risiko bencana ditinjau pada tiga aspek, yakni sosial, fisik, dan ekonomi dengan tingkatan, rendah, sedang, serta tinggi di Kota Bandung (Amri et al., 2016). Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Seksi Pencegahan dan Mitigasi Bencana Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung menyatakan bahwa Kota Bandung dari 15 tipe bencana yang diatur dalam undang-undang, terdapat enam tipe yang memiliki ancaman, kapasitas, dan bahaya yaitu gempa bumi, gunung berapi, kekeringan, banjir, pergerakan tanah, dan longsor.

Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari masyarakat Kota Bandung kerap melaksanakan Kegiatan Bina Partisipasi Masyarakat dan Kegiatan Penyuluhan Pecegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana. Berikut ini merupakan tabel yang berisi mengenai kegiatan dan anggaran sosialisasi kepada masyarakat:

Tabel 4.
Kegiatan dan Anggaran Sosialisasi Masyarakat Mengenai Kebencanaan dan Kebakaran

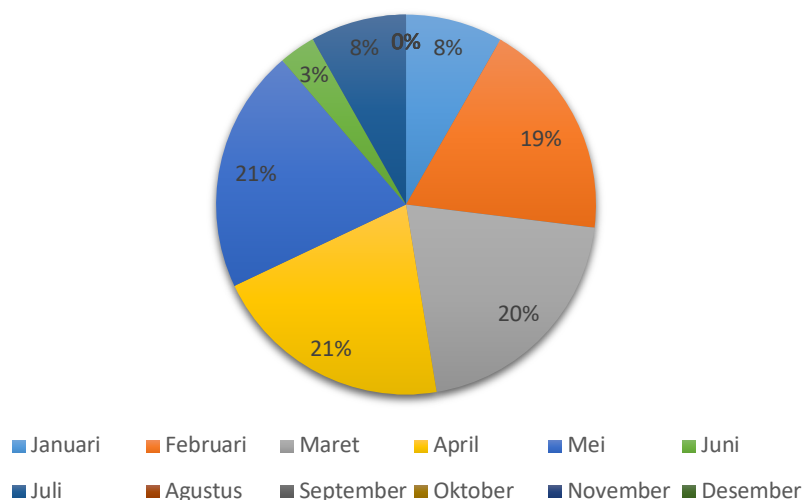
Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Target Output	Realisasi
Kegiatan Bina Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dan Bencana	539.998.800	522.233.100	96,71%	200 orang kader Kelurahan Siaga Aktif Kebakaran dan Bencana yang Terbina	200 orang kader telah terbina
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan bahaya kebakaran dan bencana	469.997.000	467.842.000	99,54%	15 kelurahan yang mendapatkan penyuluhan kebakaran dan bencana	15 kelurahan telah mendapatkan penyuluhan

Sumber: LKPJ Kota Bandung (Diolah peneliti, 2022)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung berkomitmen untuk terus membentuk kesiapsiagaan agar terbentuknya masyarakat mandiri. Terlebih pada dua kegiatan tersebut memiliki *output* untuk mengoptimalkan jumlah kader kelurahan siaga aktif bencana dan bencana yang terbina serta pemerataan jumlah penyuluhan kebakaran dan bencana. Ditinjau dari realisasi yang dilakukan target *output* yang telah ditetapkan pada perencanaan kerja telah tercapai 100%. Namun, dalam konteks realisasi anggaran. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung perlu meningkatkan persentase realisasi anggaran. Hal ini didasarkan tidak tercapainya 100% realisasi anggaran daripada kegiatan yang dilakukan yang akan mempengaruhi capaian target akan suatu kegiatan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020 bahwa pemerintah harus mencapai realisasi anggaran hingga 100% karena jika demikian artinya semua target volume *output* dan capaian IKK dapat tercapai secara efektif dan efisien (Suprianto, 2020).

Selanjutnya, media sosialisasi yang digunakan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung cukup bervariasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Pencegahan dan Mitigasi Bencana terdapat metode sosialisasi atau diseminasi langsung kepada masyarakat melalui kecamatan atau kelurahan, penyebaran informasi melalui radio di Kota Bandung, dan televisi agar dapat menjangkau masyarakat luas. Namun, setelah ditelusuri lebih dalam. Peneliti menemukan fluktuasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada masyarakat. Terdapat kekosongan kegiatan pembinaan dan diseminasi pada bulan Agustus-Desember. Hal ini didasarkan atas publikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sebagaimana berikut:

Grafik 3.
Data Penyuluhan Pencegahan Kebakaran



Sumber: Data.bandung.go.id (Diolah peneliti, 2022)

Pada diagram tersebut ditemukan bahwa jumlah partisipan yang dikategorikan pada masyarakat dengan tingkat pendidikan atau profesi seperti TK, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, Dinas, BUMN, BUMD, Hotel, dan lainnya mencapai persentase 0% pada bulan Agustus hingga bulan November. Hal ini bertolak belakang dengan hasil wawancara yang peneliti peroleh dengan aparatur pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung bahwa sosialisasi dilakukan dengan intens dan berkelanjutan pada tiap masyarakat di Kota Bandung. Lalu, tingkat intensitas daripada sosialisasi kepada masyarakat berdasarkan temuan peneliti dari hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Cisaranten Kulon dan Ketua RW 06 berkisar satu kali dalam satu tahun. Itupun hanya perwakilan masyarakat saja melalui RT dan RW, sementara setelah itu penyebaran kembali informasi dari perwakilan tersebut kepada masyarakat sangatlah minim.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pada parameter pengetahuan tentang bencana, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung telah memiliki aparatur yang telah memahami risiko bencana dan telah menentukan beberapa kegiatan dalam rangka sosialisasi pada masyarakat serta media yang dapat digunakan sebagai alat dan wadah komunikasi dalam sosialisasi tersebut. Namun, hal tersebut tidak diiringi dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat akan risiko bencana. Maka dalam hal ini perlu lebih ditingkatkan mengenai penyebaran informasi kebencanaan agar dapat menjangkau masyarakat secara keseluruhan dan berkelanjutan karena jumlah masyarakat yang tidak memahami mengenai kebencanaan dinilai banyak. Pernyataan tersebut didasarkan atas publikasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2006 bahwa salah satu faktor yang memperparah dampak akan suatu bencana ialah masyarakat yang memiliki pengetahuan, kapasitas, dan kompetensi rendah dalam membentuk kesiapsiagaan dan menanggulangi bencana yang terjadi (Adiyoso, 2018). Maka menjadikan penyebaran informasi kepada masyarakat sebagai prioritas merupakan keputusan yang tepat.

Selain itu, Pemerintah dapat melakukan pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan dan menentukan suatu metode serta panduan yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Sehingga terdapat ketepatan dalam menyosialisasikan terkait kebencanaan tersebut. Lalu, pemerintah perlu lebih memaksimalkan beragam *platform* komunikasi seperti media sosial, radio, televisi, dan komunikasi secara langsung yang mengutamakan asas kolaborasi sehingga dapat mencapai tujuan secara kolektif, efektif, dan

efisien. Sedangkan dalam sisi anggaran, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung terbilang sangat baik jika didasarkan pada pendekatan Permendagri No 54 Tahun 2010, namun berdasarkan surat edaran menteri keuangan yang telah disebutkan sebelumnya, perlu adanya peningkatan persentase realisasi anggaran hingga 100% untuk mencapai *output* dan efisiensi yang maksimal.

2. Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam rangka meningkatkan kualitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana telah menyusun beberapa program yang terdiri dari penanganan prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana. Diantara program-program tersebut ialah: (1) Program peningkatan kesiapsiagaan operasi pemadaman dan penyelamatan; (2) Program peningkatan kesiapsiagaan bahaya kebakaran dan bencana; (3) Program peningkatan sarana dan prasarana kebakaran, penyelamatan, dan bencana; dan lainnya.

Tabel 5.
Program dan Anggaran Pencegahan dan Penanganan Kebakaran dan Bencana

Program	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebakaran, Penyelamatan, dan Bencana	2019	15.024.828.232	13.568.517.759	90,31%
	2020	3.182.858.400	3.127.113.094	98,25%
2 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	2019	10.539.484.900	10.331.757.400	98,03%
	2020	11.493.613.970	11.438.399.354	99,52%
3 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana	2019	1.218.697.608	1.191.738.100	97,79%
	2020	378.226.100	365.072.540	96,52%
4 Program Peningkatan Penanggulangan Pra dan Tanggap Darurat Bencana	2019	1.097.566.150	853.187.200	77,73%
	2020	386.866.580	340.906.120	88,12%

Sumber: DKPB (Diolah peneliti, 2022)

Pada tabel tersebut ditinjau daripada realisasi anggaran pada tiap program belum adanya realisasi anggaran yang mencapai 100%. Bahkan, pada Program Peningkatan Penanggulangan Pra dan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2019 realisasi anggaran hanya mencapai persentase 77,73%. Meskipun, jika ditinjau menggunakan pendekatan Pemendagri No 54 Tahun 2020, maka capaian realisasi daripada program-program tersebut dapat dikatakan cukup hingga sangat baik. Ditambah, pada tahun 2020 terdapat peningkatan realisasi anggaran seperti pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebakaran Penyelamatan dan Bencana dan program lainnya. Tetapi, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung perlu meningkatkan realisasi anggaran dalam program pencegahan dan penanganan kebencanaan. Karena tentunya akan berimplikasi pada capaian *output* dan *outcome* dari program yang dilaksanakan.

Ditinjau pada aspek kebijakan, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung telah melaksanakan upaya untuk optimalisasi pencegahan dan penanganan bencana dengan penyediaan sarana dan prasarana serta program dalam peningkatan kapasitas masyarakat berdasarkan tabel tersebut. Hal ini sejalan dengan mekanisme pembentukan

kesiapsiagaan yang dikemukakan oleh Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan Sekjen Depkes bahwa terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilakukan dalam rangka kesiapsiagaan, diantaranya ialah pengembangan kapasitas personil dan masyarakat, ketersediaan dana operasional, dan penyiapan sarana prasarana (Adiyoso, 2018).

Lebih lanjut, mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam menunjang pelaksanaan program-program tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 6.

Sarana Unit Mobil Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Unit
1	Pemadaman Pancar	20
2	Pemadaman Tangki	3
3	Pemadaman <i>Quick Response</i>	2
4	Mobil Rescue	2
5	Mobil Tangga	2
6	Snorkle Rescue	1
7	Bus	1
8	Mobil Komando	11
9	Motor Trail	5
10	Motor Pencegahan	6
11	Angkutan Personil	1
12	Crane Rescue	1

Sumber: Data.bandung.go.id (Diolah peneliti, 2022)

Selain itu, terdapat fasilitas sarana dan prasarana lainnya seperti selang pemadam, *way connection*, *nozzle gun*, sarung tangan, tabung selamat, *webbing*, *wetsuit diving*, *snake grabstick*, dan lainnya yang berjumlah hingga 710 unit jika diakumulasikan kuantitاسnya. Hal ini menjadi sangat penting karena Adiyoso (2018) dalam bukunya mengemukakan bahwa penyediaan sarana dan prasarana merupakan hal yang penting karena dapat menjadi penentu utama dalam pembangunan kapasitas kesiapsiagaan yang berkelanjutan. Namun, jumlah tersebut tidak diiringi dengan perawatan untuk menjaga kondisi dari peralatan tersebut. Hal ini didasarkan temuan peneliti dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung bahwa terdapat 132 sarana dan prasarana dalam kondisi kurang baik, jika dipersentasekan menjadi 18,59%. Lebih lanjut, peneliti menemukan publikasi media massa yang menyatakan bahwa terdapat 200 hidran di Kota Bandung, namun dari jumlah tersebut hanya lima saja yang dapat berjalan optimal (Putra, 2020). Padahal dalam hal peningkatan sarana dan prasarana terdapat anggaran pengadaan serta pemeliharaan sebagaimana berikut.

Tabel 7.
Kegiatan dan Anggaran Peningkatan Sarana dan Prasarana

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebakaran, Penyelematan dan Bencana lainnya	13.249.598.232	11.851.551.000	89,45%
2	Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran, penyelematan, dan bencana lainnya	1.066.080.000	1.023.686.024	96,02%
3	Kegiatan rehabilitasi dan distribusi sarana prasarana kebakaran, penyelematan, dan bencana lainnya	709.150.000	693.280.735	97,76%

Sumber: LKPJ Kota Bandung (Diolah peneliti, 2022)

Dengan anggaran tersebut seharusnya pemerintah dapat mengoptimalkan fungsionalitas daripada sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pembentukan kesiapsiagaan dan penanggulangan kebencanaan di masyarakat. Selanjutnya, berbicara mengenai parameter kebijakan dalam pembentukan kesiapsiagaan pada masyarakat terdapat unsur lainnya seperti optimalisasi sumber daya manusia dan integrasi kurikulum kebencanaan pada tingkat sekolah. Pada optimalisasi sumber daya manusia, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung mengusung konsep *pentahelix* yang mana mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media. Hal ini diutarakan oleh Seksi Pencegahan dan Mitigasi Bencana saat melakukan wawancara, sebagaimana berikut:

“DKPB itu mengusung konsep pentahelix collaborative governance seperti akademisi, swasta, masyarakat, media. Dan kita mulai menjadikan masyarakat sebagai subjek. Bukan objek. Karena kalau objek kan penerima aja. Tapi menjadi pelaku juga.”

Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung pun membentuk suatu organisasi yang dinamakan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Organisasi tersebut berdasarkan penuturan daripada Seksi Darurat Logistik merupakan perpaduan antara 38 komunitas yang menjadi titik awal manifestasi penerapan model *pentahelix* dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga kedepannya akan terdapat beragam kolaborasi baik dalam pra hingga pasca bencana di Kota Bandung. Terlebih kendala utama yang dihadapi dalam pembentukan kesiapsiagaan adalah kekurangan sumber daya manusia dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Maka kendala dan hambatan tersebut dapat teratasi melalui konsep kolaborasi yang telah diterapkan. Terlebih peneliti menemukan bahwa telah terjadinya komunikasi intens dalam kolaborasi program bersama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia dan Palang Merah Indonesia dalam membentuk kesiapsiagaan berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana KNPI Kota Bandung. Bahkan dalam penelitian Alryanto (2017) pada saat terjadinya bencana PMI dan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung selalu bersinergi dalam membantu dan menangani dampak dari bencana yang terjadi.

Sedangkan pada indikator selanjutnya mengenai kebencanaan di kurikulum pendidikan. Dalam publikasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan terdapat pernyataan bahwa dalam rentang 15 tahun terakhir telah terjadi kurang lebih 10 bencana dengan total kerusakan

47.568 sekolah di Indonesia. Maka dari itu, pendidikan kebencanaan dalam lingkup sekolah perlu diterapkan. Dalam hal ini, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa sosialisasi dan pelatihan pada sekolah-sekolah terutama pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama tetap dilakukan. Namun, sosialisasi tersebut terbilang masih minim dan belum berkelanjutan. Ditambah berdasarkan penuturan Seksi Pencegahan dan Mitigasi Bencana belum adanya kajian dan modul untuk melakukan pendekatan multivelel kepada siswa/i pada tingkat SD, SMP, dan SMA yang semakin menghambat keefektifan sosialisasi.

Berangkat dari penuturan tersebut, peneliti melakukan validasi dengan mencari modul resmi mengenai kebencanaan. Lalu, ditemukan bahwa terdapat modul Pendidikan Tangguh Bencana yang merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan UNICEF. Modul tersebut berisi mengenai informasi umum kebencanaan, petunjuk pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), dan mengenai teknis bagaimana penerapan pendidikan bencana mulai dari tingkatan keluarga hingga sekolah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan (Heri & Caesar, 2018) bahwa Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan modul dalam pembentukan fasilitas dan pencegahan risiko bencana.

Tidak hanya menargetkan pada siswa/i di Kota Bandung. Pemerintah sepatutnya membentuk masyarakat tangguh dan mandiri dalam menghadapi kebencanaan secara umum. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung membuat kebijakan Kelurahan Tanggap Bencana yang merupakan upaya untuk pemberdayaan masyarakat sebagai unsur pendukung dalam membantu pelaksanaan kesiapsiagaan kebakaran dan bencana lainnya. Diantara kegiatan pada pembentukan Kelurahan Tanggap Bencana ialah penyediaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran atau bencana pada tiap kelurahan. Lalu, terdapat sosialisasi dan pelatihan untuk masyarakat setempat yang diklasifikasikan pada suatu kelurahan. Dalam LKPJ Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung terdapat 30 kelurahan yang telah dipenuhi sarana prasarana seperti alat pemadam api ringan dan telah mengikuti program kelembagaan seperti sosialisasi dan mitigasi.

Adapun capaian kinerja daripada program Kelurahan Tanggap Bencana tersebut mencapai angka realisasi 97,37% ditinjau dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) pada tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Pencegahan dan Mitigasi Bencana diperoleh informasi bahwa tidak tercapainya capaian kinerja tersebut dikarenakan pada beberapa kelurahan belum memenuhi indikator pratama daripada kelurahan siaga aktif kebakaran dan bencana. Sehingga pada implementasinya, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung tidak bisa sembarang memberikan predikat Kelurahan Tangguh Bencana maka dari itu capaian target tersebut tidak dapat terealisasi hingga 100%.

Melihat dari temuan tersebut, peneliti menilai terdapat kesesuaian antara upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui program pra bencana dan tanggap bencana dengan parameter kebijakan dalam perspektif *disaster risk management*. Hal ini didasarkan atas indikator yang dikemukakan oleh Adiyoso (2018) bahwa dalam upaya pembentukan kesiapsiagaan maka diperlukan perencanaan matang mengenai alokasi sumber daya manusia, fasilitas, dan juga dimasukkannya materi kesiapsiagaan terhadap bencana pada kurikulum pendidikan. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang memaparkan bahwa kebijakan-kebijakan kesiapsiagaan didesain untuk menjadi investasi di masa yang akan datang dalam mengurangi dampak dari potensi bencana di Kota Bandung. Sejalan dengan pernyataan tersebut, dalam naskah *blueprint Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*, investasi pada bencana merupakan hal yang esensial baik itu secara

terstruktur ataupun tidak terstruktur untuk meningkatkan *resilience* pada aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya masyarakat (Danan, 2020).

Selanjutnya, ketersediaan sarana prasarana dan partisipasi masyarakatpun menjadi salah satu fokus pada saat implementasi program tersebut seperti tersedianya 710 unit dalam hal kebencanaan, terdapatnya Forum Pengurangan Risiko Bencana, dan dibentuknya program Kelurahan Tanggap Bencana. Sehingga pemerintah dapat bersinergi dengan berbagai elemen dalam mencapai tujuan pembentukan kesiapsiagaan pada masyarakat. Namun demikian, perlu adanya peningkatan pada aspek pembentukan kesiapsiagaan pada lingkup sekolah melalui kerjasama secara kontinu dengan pihak sekolah dan penyebaran modul Pendidikan Tangguh Bencana. Sedangkan, ditinjau daripada aspek anggaran program-program tersebut perlu adanya optimalisasi peningkatan realisasi anggaran. Hal ini dilihat daripada persentase realisasi yang masih di bawah 100%. Pemerintah perlu meningkatkan pemanfaatan anggaran tersebut agar implementasi program kebencanaan dapat berjalan lebih efektif.

3. Perencanaan Kedaruratan

Dalam rangka melaksanakan perencanaan kedaruratan, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung membentuk kegiatan-kegiatan mitigasi baik itu dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dan fasilitas informasi kedaruratan. Tabel berikut menunjukkan beberapa kegiatan daripada perencanaan kedaruratan beserta alokasi anggaran dalam rangka pengimplementasian kegiatan tersebut.

Tabel 8.
Kegiatan Penyelenggaraan Pra dan Tanggap Darurat Bencana

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana	407.348.700	286.312.150	70,29%
2	Kegiatan fasilitasi penanganan darurat	273.924.000	249.889.400	91,23%
3	Kegiatan kerjasama bantuan penanggulangan bencana	416.293.450	316.985.650	76,14%

Sumber: LKPJ Kota Bandung (Diolah peneliti, 2022)

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung telah menyelenggarakan kegiatan dalam rangka kedaruratan jika terjadi bencana. Meskipun demikian pemerintah belum memanfaatkan secara optimal daripada anggaran yang dimilikinya. Hal ini dapat dilihat pada realisasi anggaran yang tidak mencapai 100%. Berdasarkan LKPJ Kota Bandung, tidak terealisasinya anggaran tersebut secara optimal berimplikasi pada salah satu indikator kegiatan, yakni kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana. Pada target yang telah ditetapkan bahwa aparaturnya dan masyarakat harus menerima informasi mengenai potensi bencana dan pelatihan untuk menghadapi risiko bencana pada tiap wilayahnya dengan jumlah 200.000 orang. Namun, dalam hal ini target tersebut baru mencapai 1.589 orang yang telah diberikan informasi dan pelatihan.

Selain daripada itu, untuk mengoptimalkan penanganan kedaruratan dalam menghadapi kebakaran atau bencana, Walikota mengukuhkan Surat Keputusan Nomor: 364/Kep.392-DPPK/2013 mengenai pengangkatan satuan relawan kebakaran dan bencana tingkat kelurahan di Kota Bandung (Wardhana, 2018). Dalam surat keputusan tersebut disebutkan bahwa SATWANKAR sedikitnya memiliki tiga fungsi. *Pertama*, membantu secara sukarela tugas dalam melaksanakan pencegahan, penanggulangan, dan keselamatan dari bencana. *Kedua*, dalam hal terjadi bencana atau kebakaran segera melaksanakan tindakan pertama seperti

memadamkan secara bersama-sama dan segera melaporkannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Dengan catatan, jika petugas sudah datang, selanjutnya harus mengikuti arahan daripada petugas tersebut. *Ketiga*, membantu pelaksanaan pembinaan, pelatihan, dan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membentuk kesiapsiagaan. Program SATWANKAR ini merupakan bagian daripada program Kelurahan Tanggap Bencana yang memiliki tujuan untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam kesiapsiagaan dan menghadapi risiko bencana. Adapun untuk jumlah SATWANKAR yang di Kota Bandung sebagai berikut:

Tabel 9.

Data Satuan Relawan Kebakaran Kota Bandung

No	Kecamatan	Jumlah Relawan
1	Antapani	20
2	Cicendo	31
3	Babakan Ciparay	34
4	Bojongloa Kaler	31
5	Sumur Bandung	23
6	Cinambo	12
7	Kiaracondong	15
8	Regol	25
9	Bandung Kidul	7
10	Batununggal	52
11	Lengkong	8
12	Andir	34
13	Astanaanyar	28
14	Bojongloa Kidul	50
15	Bandung Kulon	9
16	Cibeunying Kidul	28
17	Cibeunying Kaler	28
18	Ujungberung	31
19	Bandung Wetan	21
20	Buah Batu	23
21	Gedebage	12
22	Cibiru	25
23	Panyileukan	20
24	Coblong	21
25	Rancasari	29
26	Sukajadi	6
27	Arcamanik	18
28	Cidadap	16
29	Sukasari	7
30	Mandalajati	11
	Jumlah	675

Sumber: Data.bandung.go.id (Diolah peneliti, 2022)

Tabel tersebut menunjukkan jumlah SATWANKAR di Kota Bandung sangatlah banyak dan merata pada tiap kelurahan. Meskipun terdapat perbedaan dari jumlah antar kelurahan seperti pada Kecamatan Batununggal yang memiliki 52 relawan, sedangkan pada Kecamatan Sukajadi hanya terdapat 6 relawan. Seharusnya dengan jumlah SATWANKAR tersebut

tindakan prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana lebih sigap dan tertata. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wardhana, 2018) ditemukan empat kendala utama yang mengakibatkan kualitas kinerja SATWANKAR terbilang rendah.

Pertama, pembentukan SATWANKAR tidak berjalan sesuai harapan. Hal ini didasarkan atas informasi bahwa sebagian anggota SATWANKAR merupakan penduduk musiman atau tidak tetap. Lalu, tidak terdapatnya pertukaran informasi mengenai sesama anggota SATWANKAR. *Kedua*, keterbatasan dana yang dimiliki dalam upaya mendukung proses pembinaan anggota SATWANKAR. *Ketiga*, partisipasi masyarakat masih terbilang rendah karena sosialisasi yang dilakukan belum secara kontinu. *Keempat*, belum terdapatnya alur dan jalur komunikasi antara aparat dan masyarakat mengenai kebencanaan. Hal ini didukung dengan riset yang dilakukan oleh (Rianti & Esfandari, 2019) bahwa komunikasi antara Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung terhadap SATWANKAR dan masyarakat belum optimal karena komunikasi hanya terjadi saat penyuluhan saja dan intensitas sosialisasi-pun relatif rendah. Selain daripada itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Cisaranten Kulon ditemukan bahwa kinerja SATWANKAR kurang optimal pada masa prabencana, yakni pasifnya dalam pemberian sosialisasi dan pelatihan ringan mengenai kebencanaan.

Selain pada pentingnya pemahaman masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan informasi daerah rawan bencana, tempat dan rute evakuasi. Hal ini menjadi esensial karena dengan adanya informasi tersebut maka dapat mengurangi dampak ekonomi dan material akan suatu bencana (Adiyoso, 2018). Pemerintah melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung telah menentukan zonasi rawan bencana yang meliputi sub zona rawan genangan banjir, gerakan tanah, kebakaran, gempa bumi, dan letusan gunung berapi.

Tabel 10.
Lokasi Rawan Bencana Kota Bandung

Sub Zona Rawan Bencana	Lokasi
Gerakan tanah dan longsor	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo b. Sarijadi, Kecamatan Sukajadi c. Isola, Kecamatan Sukasar d. Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong e. Cipaganti, Kecamatan Coblong f. Hegarmana, Kecamatan Cidadap g. Ciuimbuleuit, Kecamatan Cidadap h. Sukawarna, Kecamatan Sukajadi i. Dan lainnya
Banjir Cileuncang/Genangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan Gatot Subroto b. Jalan Moh. Toha c. Jalan Kiaracandong d. Jalan Ahmad Yani e. Samoja, Kecamatan Batununggal f. Pasirluyu, Kecamatan Regol g. Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo
Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Sub Wilayah Kota Bojonagara b. Sub Wilayah Kota Cibeunying
Gunung Berapi	<ul style="list-style-type: none"> a. Sub Wilayah Kota Cibeunying b. Sub Wilayah Kota Bojonagara c. Dago, Kecamatan Coblong
Gempa Bumi	<ul style="list-style-type: none"> a. Sub Wilayah Kota Cibeunying b. Sub Wilayah Kota Bojonagara c. Cisurupan, Kecamatan Cibiru d. Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage

Sumber: Perda Kota Bandung No 10 Tahun 2015 & Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Adapun untuk jalur evakuasi bencana difokuskan pada beberapa lokasi seperti Husein Sastranegara, Cicendo, Hegarmanah, Sukawarna, Pasteur, Arjuna, Sukaraja, Sukagalih, Gegerkalong, dan Garuda yang nantinya akan diklasifikasikan berdasarkan bencana yang terjadi. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Pencegahan dan Mitigasi Bencana bahwa lokasi evakuasi lainnya yang telah ditetapkan ialah Taman Tegallega, Kiara Artha Park, dan Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Sehingga dalam hal ini Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung telah menentukan lokasi rawan bencana dan tempat atau jalur evakuasi yang nantinya akan dimanfaatkan jika terjadi suatu bencana.

Meskipun demikian, saat peneliti melakukan penelusuran pada wilayah-wilayah yang dinyatakan rawan bencana dan sebagai tempat untuk evakuasi. Tidak ada rambu-rambu yang menginformasikan hal tersebut. Bahkan, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama Seksi Pencegahan dan Mitigasi Bencana diperoleh bahwa di Kota Bandung belum ada rambu-rambu yang memberikan informasi terkait rute evakuasi dan daerah rawan bencana. Lebih lanjut, berdasarkan pernyataan Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana KNPI Kota Bandung bahwa di Kota Bandung belum terdapat peringatan baik berupa plang, banner, dan media informasi lainnya yang langsung pada masyarakat. Sehingga jika terdapat ancaman bencana, masyarakat akan kebingungan mengenai rute ataupun tempat evakuasi yang akan dituju.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung perlu meningkatkan kualitas daripada SATWANKAR sebagai agen dalam masyarakat untuk pemberian sosialisasi dan penanganan pertama kepada masyarakat. Lalu, pemerintah dapat memberi rambu-rambu untuk memberikan informasi yang jelas pada masyarakat mengenai potensi bencana di wilayahnya. Hal ini ditujukan untuk mengurangi dampak dan kerugian jika suatu saat terjadi bencana karena masyarakat sudah mengetahui mengenai risiko lingkungan tempat tinggalnya. Karena dalam membentuk perencanaan kedaruratan menurut Adiyoso (2018) perlu diiringi dengan kemampuan masyarakat untuk menerapkan pengetahuan mengenai kebencanaanya, terdapatnya panduan seperti mekanisme sebagai standar pelaksanaan kesiapsiagaan, lokasi penampungan sementara, rute evakuasi, dan pelatihan intens personil dalam menanggapi tanggap darurat. Sedangkan ditinjau dari sisi anggaran, pemerintah perlu meningkatkan pemanfaatan penggunaan dana agar dapat memperoleh *output* dan *outcome* yang maksimal.

4. Sistem Peringatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Darurat Logistik dan Seksi Pencegahan dan Mitigasi Bencana, peneliti memperoleh informasi bahwa Kota Bandung saat ini belum memiliki *early warning system* atau penyiapan alat instrumen sistem peringatan dini. Begitupun dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Sekretaris Kelurahan Cisaranten Kulon dan Ketua RW 06 Cisaranten Kulon bahwa disaat terjadi potensi bencana, tidak ada pesan darurat ataupun peringatan dini terhadap masyarakat.

Hal ini tentu bertolak belakang dengan konsep Smart City yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bandung. *Early Warning System* dapat dikembangkan dengan penggunaan aspek teknologi dan diintegrasikan dengan teknologi *mobile* dan *internet of things*. Hal ini dikemukakan oleh (Satria et al., 2017), bahwa terdapat beragam alat yang dapat digunakan seperti penerapan mikrokontroler Arduino Uno dan modul GSM untuk memberikan informasi mengenai bencana banjir dan longsor untuk memberikan informasi gejala bencana tersebut pada masyarakat melalui SMS. Sehingga Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung perlu menyiapkan dan mengembangkan sistem peringatan dini untuk masyarakat melalui penyediaan informasi yang dapat dipercaya, penyediaan alat atau tanda bahaya yang disepakati, dan mekanisme penyebarluasan peringatan tersebut.

Lebih lanjut, Adiyoso (2018) memaparkan bahwa pembentukan mekanisme sistem peringatan dini ini perlu dilaksanakan dalam pembentukan kesiapsiagaan karena dapat menekan dampak yang diperoleh dari suatu bencana yang terjadi seperti pengelolaan peringatan dini, pengamatan gejala bencana, penyeberan informasi, dan ketersediaan alat penyebaran informasi menjadi hal yang esensial dalam upaya pembentukan kesiapsiagaan masyarakat. Hal ini perlu dibangun secara kolektif yang melibatkan beragam unsur pihak seperti masyarakat, akademisi, swasta, media, dan instansi lainnya agar terbentuk kepedulian bersama dan pemahaman mengenai pentingnya pembentukan kesiapsiagaan akan potensi bencana. Lebih lanjut, pada saat peneliti melakukan telaah pada LAKIP Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung tidak ditemukannya kegiatan dan alokasi anggaran dalam rangka pembentukan *early warning system*.

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan melalui perspektif *disaster risk management*, peneliti menyimpulkan bahwa pembentukan kesiapsiagaan akan bahaya kebakaran dan bencana di Kota Bandung belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini dapat didukung dengan temuan bahwa pada parameter pengetahuan tentang bencana,

perencanaan kedaruratan, dan sistem peringatan terdapat kekurangan dalam implementasinya. Diantara faktor yang menyebabkan hal tersebut ialah rendahnya pengetahuan masyarakat akan kebencanaan, kegiatan sosialisasi belum dilaksanakan secara menyeluruh, kinerja SATWANKAR pada tiap kelurahan tidak berjalan dengan efektif pada prabencana, tidak terdapatnya rambu-rambu untuk memberikan informasi terkait daerah rawan bencana, dan belum tersedianya *early warning system*. Sehingga perlu dilakukan peningkatan dan pembaharuan agar terbentuk kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Ditambah, ditinjau pada optimalisasi penggunaan anggaran, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung perlu meningkatkan pemanfaatan dan optimalisasi anggaran dikarenakan masih terdapat realisasi anggaran yang tidak mencapai 100%.

Referensi

- Adiyoso, W. (2018). *Manajemen Bencana*. Bumi Aksara.
- Alryanto, T. (2017). *Strategi Pemerintah Daerah Kota Bandung Dalam Mitigasi Bencana Daerah di Kota Bandung Tahun 2017 (Studi Pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung)*. Universitas Padjadjaran.
- Amri, M. R., Yulianti, G., Yunus, R., Wiguna, S., Adi, A. W., Ichwana, A. N., Randongkir, R. E., & Septian, R. T. (2016). *Resiko Bencana Indonesia*. BNPB.
- Artiningsih, Setyono, J. S., & Yuniartanti, R. K. (2016). The Challenges of Disaster Governance in an Indonesian Multi-hazards City: A Case of Semarang, Central Java. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 227(November 2015), 347–353. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.081>
- BPS. (2021). *Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018-2020*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>
- Danar, O. R. (2020). Disaster Governance. In *Isnet.or.Id* (Issue Febuari). DIVA Press.
- Engkus, E., Budiman, B., Sakti, F., Afiah, S., & Nurmawan, N. (2020). The Pollution of the Citarum River Watershed (DAS): Analysis of Control Policy Implementation in Indonesia. *Italienisch*, 10(2), 24–33.
- Heri, H., & Caesar, R. (2018). Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Berbasis Sekolah. *Jurnal Academia Praja*, 1(02), 91–106. <https://doi.org/10.36859/jap.v1i02.67>
- jabarprov.go.id. (2018). *BPBD Jabar Ajak Masyarakat Lakukan Mitigasi Bencana*. PPID Provinsi Jawa Barat. <https://ppid.jabarprov.go.id/posting/read/985-BPBD-Jabar-Ajak-Masyarakat-Lakukan-Mitigasi-Bencana>
- Kertiani, N. M., Kusumawati, N. P. A., & Ayi, P. C. (2020). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Dinas Pemeirntah Kabupaten Badung. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, April, 204–222.
- Khambali, I. (2017). *Manajemen Penanggulangan Bencana*. ANDI.
- Marlyono, S. G., Pasya, G. K., & Nandi. (2016). Peranan Literasi Informasi Bencana Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Masyarakat Jawa Barat. *Gea. Jurnal Pendidikan Geografi*, 16(2), 116–123.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

- Muis, I., Ismail, Erlangga, H., & Engkus. (2019). Post disaster social vulnerability: Policy analysis and implementation in communities in Indonesia. *Journal of Critical Reviews*, 6(5), 59–65. <https://doi.org/10.22159/jcr.06.05.10>
- Pusparisa, Y. (2020). *Rentetan Letusan Gunung Api di Indonesia Selama 2011-2019*. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/03/03/2018-puncak-letusan-gunung-api>
- Pusparisa, Y. (2021). *8.264 Gempa Bumi Guncang Indonesia pada 2020*. Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/25/8264-gempa-bumi-guncang-indonesia-pada-2020>
- Putra, W. (2020). *Ratusan Hidran di Kota Bandung Tak Berfungsi Maksimal*. News.Detik.Com. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4942657/ratusan-hidran-di-kota-bandung-tak-berfungsi-maksimal>
- Putri, A. S. (2020). *Jenis-Jenis Bencana Alam, Nonalam dan Sosial*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/06/070000069/jenis-jenis-bencana-alam-nonalam-dan-sosial>
- Rianti, H. I., & Esfandari, D. A. (2019). *Strategi Komunikasi Dinas Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung Dalam Program Pembinaan Satuan Relawan Kebakaran Kota Bandung Communication Strategy of Bandung City Fire and Disaster Management in the Bandung City Volunteer Volunteer Unit Deve*. 6(3), 6755–6764.
- Ridwan, M. F. (2019). *BNPB: Pengetahuan Masyarakat Terhadap Bencana Relatif Rendah*. Republika.Co.Id. <https://www.republika.co.id/berita/pqikjf335/bnpb-pengetahuan-masyarakat-terhadap-bencana-relatif-rendah>
- Rozai, A. M., & Subagiyo, L. (2015). Optimalisasi Penyerapan Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Organisasi (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Boyolali). *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 9(1), 72–89.
- Sagala, S., Adhitama, P., & Sianturi, D. G. (2013). Analisis Upaya Pencegahan Bencana Kebakaran di Permukiman Padat Perkotaan Kota Bandung, Studi Kasus Kelurahan Sukahaji. *Resilience Development Initiative (RDI)*, 3(3), 5–18.
- Satria, D., Yana, S., Munadi, R., & Syahreza, S. (2017). Sistem Peringatan Dini Banjir Secara Real-Time Berbasis Web Menggunakan Arduino dan Ethernet. In *Jurnal JTIC (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)* (Vol. 1, Issue 1, p. 1). <https://doi.org/10.35870/jtik.v1i1.27>
- sipongi.menlhk.go.id. (2021). *Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2021*. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia. http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran
- Suprianto, E. (2020). *Optimalisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran*. Djpb.Kemenkeu.Go.Id. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/laht/id/data-publikasi/artikel/2861-optimalisasi-capaian-indikator-kinerja-utama-persentase-kualitas-pelaksanaan-anggaran.html>
- Wardhana, D. (2018). Optimalisasi Kinerja Satuan Relawan Kebakaran (Satwankar) Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, 1, 49–63.